

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ginting dan Novatalina (2018) menguji Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, *Debt Default*, dan Opini Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bei Tahun 2014-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *Debt default* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Ada tidaknya suatu perusahaan mengalami kegagalan dalam membayar hutangnya (*debt default*) tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mendapatkan kondisi *debt default* (kegagalan membayar hutang) akan tetap hidup atau berjalan. Sedangkan variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian ini menemukan bukti bahwa kualitas audit yang diprosikan dengan KAP *big four* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Sementara penelitian Tandungan dan Mertha (2016) yang menguji pengaruh Komite Audit, ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan reputasi KAP terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa independensi auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjalin antara klien dengan auditor. Auditor akan memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan apabila ada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan, tanpa mempedulikan insentif ekonomi yang akan hilang akibat kehilangan klien.

Penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) yang berjudul pengaruh auditor *client tenure*, *debt default*, reputasi auditor, ukuran klien dan kondisi keuangan terhadap kualitas audit melalui opini audit *going concern* menunjukkan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *debt default*, semakin dimungkinkan menerima opini audit berkaitan dengan *going concern*.

Penelitian yang dilakukan Ningsih, dkk (2015) yang berjudul pengaruh kualitas audit, *audit client tenure*, *debt default*, *opinion shopping* dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Baik auditor yang tergolong spesialis industri maupun non spesialis industri sama-sama berusaha memberikan jaminan profesionalitas pekerjaan audit yang obyektif kepada kliennya. Sedangkan *Audit client tenure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka akan semakin kecil pula kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit

going concern. *Debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa *debt default* digunakan oleh auditor dalam mengambil keputusan untuk mengeluarkan opini audit berkaitan dengan *going concern* sesuai dengan yang tercantum dalam PSA 30 seksi 341.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.

2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse).

Jensen dan Mekling (1976) menjelaskan bahwa pemilik (prinsipal) memberikan delegasi kepada manajemen (agen) untuk melaksanakan kepentingan pemilik. Diasumsikan bahwa prinsipal dan agen sebagai orang ekonomi yang rasional dan umumnya termotivasi oleh kepentingan pribadi tapi mereka dapat membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi, dalam hal ini pihak prinsipal adalah pemegang saham (Stakeholder) dan pihak agen adalah manajemen.

Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham (Stakeholder). hal tersebut membuat sebuah kondisi yang disebut dengan asimetri informasi, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan dianggap memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Karena adanya asimetri informasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara

manajemen dan pemilik perusahaan untuk saling mencoba memanfaatkan kelemahan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut auditor mampu menjembatani kepentingan pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang independen, auditor memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi kebijakan manajemen perusahaan apakah sudah sesuai dengan kehendak pemilik perusahaan. Selain dari hal tersebut auditor akan memeriksa kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan (Lie, Wardani, & Pikir, 2016).

2.2.2 Debt Default

Dalam PSAK 30, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen K, 1992). Manfaat status *default* hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status *default* terhadap opini *going concern*. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan dalam keadaan *default*, tinggi sekali, karenanya diharapkan status *default*

dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

Apabila perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-fakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan memberikan status *default* (Chen K, 1992). Informasi apakah perusahaan gagal membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau tidak dapat ditemukan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen K, 1992), yaitu :

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

2.2.3 Audit Tenure

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dimana masa perikatan (*audit partner*) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor

akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Werastuti (2013) menemukan bahwa kualitas audit semakin meningkat dengan semakin lamanya *audit tenure*. Hal ini akan mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan auditor akan lebih baik seiring dengan masa kerja yang lebih lama karena asimetri informasi antara auditor dan klien semakin berkurang (Nursasi, 2015).

Hubungan auditor dengan perusahaan klien yang lama ini berpotensi menjadikan auditor merasa puas pada apa yang dilakukan seperti melakukan audit yang kurang tegas dan terlalu tergantung pada pernyataan manajemen (Werastuti, 2013). Semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapat opini audit *going concern*. Hal ini merupakan bukti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa independensi auditor terganggu dengan lamanya perikatan antara auditor dengan klien (Nursasi, 2015).

2.2.4 Opini Audit

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat (Susanto & Aquariza, 2012).

Informasi utama pada laporan audit adalah opini audit yang terdapat pada paragraf pendapat. Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini audit terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, (3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, dan (5) Tidak Memberikan Pendapat.

2.2.5 Kualitas Audit

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghazali, 2017). Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.

Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA 220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat

hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental auditor (Flint, 1988).

Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan emosional yang membuat auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, sehingga menurunkan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).

Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien memiliki potensi menimbulkan *attachment* antara kedua pihak sehingga dapat mengganggu independensi auditor. Lamanya hubungan tersebut dapat menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap keputusan pelaporan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan menyebabkan penurunan kualitas audit (Baker & Thuneibat, 2011).

Kualitas audit sering diproksikan dengan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* maupun dengan *Non Big Four*. Ukuran KAP *big four* didasarkan pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima atas jasa audit atau jasa lainnya. Kategori KAP *big four* di Indonesia terdiri dari:

1. *KAP Price Waterhouse Coopers*, yang berafiliasi dengan kantor KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. *KAP Deloitte Touche Thomatsu Limited*, yang berafiliasi dengan KAP Osman BingSatrio
3. *KAP Ernst & Young*, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suhermandan Surja (PSS)
4. *KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler)*, yang berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

2.2.6 Opini *Going Concern*

Opini *Going Concern* adalah opini audit yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011). Opini *going concern* adalah opini auditor yang didalamnya terdapat paragraf penjelasan tentang perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30 memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada laporan auditor jika auditor memberikan opini *going concern* kepada *auditee*. seperti berikut ini:

“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian

yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Debt Default* Terhadap Pemberian Opini *Going Concern*

Debt Default merupakan kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-fakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan memberikan status *default* (Chen K, 1992).

Penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) menunjukkan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *debt default*, semakin dimungkinkan menerima opini audit berkaitan dengan *going concern*. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Debt Default* Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemberian Opini *Going Concern*.

2.3.2 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Pemberian Opini *Going Concern*

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008

dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun (Tandungan, 2016).

Penelitian Nursasi dan Maria (2015), menyatakan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*, sedangkan menurut Ardiani Dkk. (2012) menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Audit Tenure* berpengaruh terhadap pemberian Opini *Going Concern*.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pemberian Opini *Going Concern*

Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.

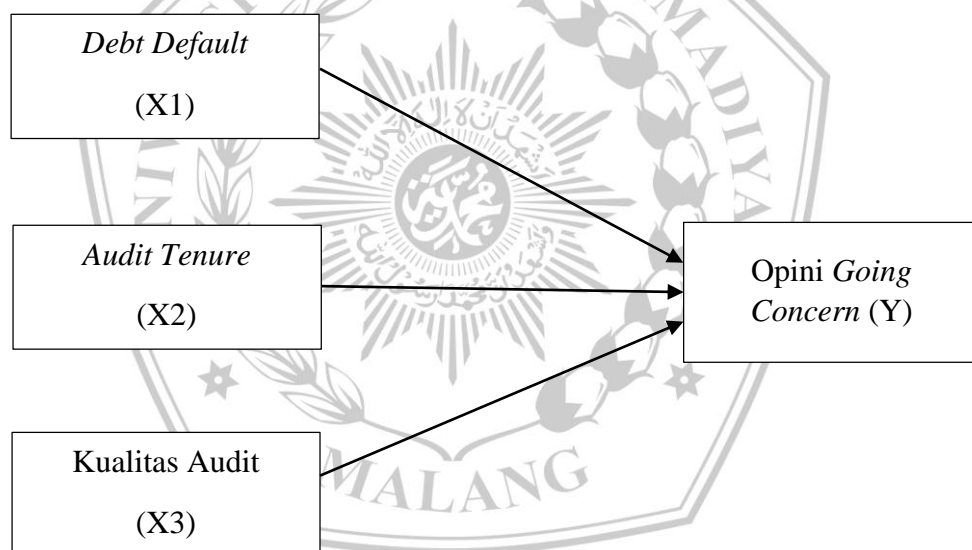
Penelitian yang dilakukan Wisanggeni dan Ghozali (2017) menunjukkan kualitas audit yang diproksi dengan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, jadi dapat dikatakan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* adalah perusahaan yang cenderung memiliki kinerja dan

karakteristik yang baik. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Pemberian Opini *Going Concern*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini dan teori apa yang digunakan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan objek yang diteliti. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian